

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PENGURUS MANAJEMEN KOPERASI (STUDI KASUS : PONDOK PESANTREN ULIL ALBAB)

Aep Tatasuryana¹ ; Nesta Silvana² ; Serly Amalia³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam manajemen koperasi pondok pesantren, dengan fokus pada praktik sehari-hari, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang ada. Implementasi demokrasi dalam koperasi sangat penting untuk menjamin keberhasilan operasional. Koperasi di pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembinaan karakter bagi santri. Dengan menerapkan prinsip demokrasi, koperasi dapat menciptakan lingkungan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait kebijakan yang diambil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana koperasi pondok pesantren dapat berfungsi secara efektif sebagai institusi demokratis. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan partisipasi anggota dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip demokrasi diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dan mencapai tujuan sosial serta ekonomi yang lebih luas.

Kata Kunci: Demokrasi; Koperasi; Manajemen; Penerapan; Prinsip

Abstract

This research aims to explore the application of democratic principles in the management of Islamic boarding school cooperatives, focusing on daily practices, challenges faced, and existing opportunities. The implementation of democracy in cooperatives is very important to ensure operational success. Cooperatives in Islamic boarding schools not only function as economic entities, but also as a means of education and character development for students. By applying democratic principles, cooperatives can create an environment that is deterministic, transparent, and accountable. The decision-making process involving all members allows each member to express opinions and proposals related to the policies taken. The method used in this study is a literature study, by collecting secondary data from various sources such as books, journals, articles, and other

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, aeptatasurya@uinsgd.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, nestasilvana2014@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serlyamall22@gmail.com

documents. This research is expected to provide an overview of how Islamic boarding school cooperatives can function effectively as democratic institutions. In addition, it also aims to provide recommendations to increase member participation and better management. Thus, the application of democratic principles is expected to strengthen the role of cooperatives in meeting the needs of their members and achieving broader social and economic goals.

Keywords: Democracy; Cooperation; Management; Application; Principle

A. PENDAHULUAN

Implementasi demokrasi dalam manajemen koperasi pondok pesantren merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan keinginan dan keberhasilan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi di pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wahana pendidikan dan pembinaan karakter bagi santri. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip demokrasi menjadi krusial untuk menciptakan suasana partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Demokrasi dalam manajemen koperasi pondok pesantren tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak suara dalam rapat anggota, di mana mereka dapat menyampaikan pendapat dan usulan terkait kebijakan di antara anggota, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan koperasi.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pengurus dan anggota. Pengurus dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, sehingga anggota dapat memahami penggunaan dana dan hasil usaha koperasi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi pilar utama dalam manajemen koperasi yang demokratis.

Koperasi pondok pesantren juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi santri dalam hal organisasi dan kewirausahaan. Melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan koperasi, santri dapat mengembangkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Jadi implementasi demokrasi dalam manajemen koperasi tidak hanya mendukung aspek ekonomi, tetapi juga karakter pendidikan dan pengembangan potensi santri.

Secara keseluruhan, penerapan demokrasi dalam manajemen koperasi pondok pesantren merupakan langkah strategis untuk menciptakan koperasi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip demokratis, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga yang memberdayakan anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan demokrasi

dalam koperasi pondok pesantren, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana koperasi pondok pesantren dapat berfungsi secara efektif sebagai institusi demokratis, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi anggota dan pengelolaan yang lebih baik

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara.

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. (Retnowati, 2015) Menurut Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Pengertian Manajemen Koperasi

Menurut G.R Terry, manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Maulana & MM, 2020) Sedangkan menurut Anton Mulyono Aziz dan Maya Iryanti (2014:5) menjelaskan manajemen adalah seni pengelolaan meliputi totalitas dari bagian yang terpisah-pisah serta kemampuan untuk menciptakan gambaran tentang suatu visi.

Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Sitio, 2001)

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Dapat disimpulkan manajemen koperasi adalah cara mengatur dan mengelola koperasi agar dapat mencapai tujuan secara profesional dengan

memanfaatkan semua sumber daya yang ada demi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur atau dikenal dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dalam koperasi merujuk pada penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Hal ini menekankan partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam proses pembuatan keputusan, yang dilakukan secara kolektif dan transparan. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki suara yang sama dalam rapat umum, pemilihan pengurus serta dalam penetapan kebijakan dan strategi koperasi. Dengan menerapkan demokrasi, koperasi tidak memberdayakan anggotanya saja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam operasionalnya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif. (Dr. H. Aep Tata Suryana, 2023) Prinsip demokrasi ini tidak mendukung keberlangsungan dan efektivitas organisasi saja, tetapi menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan dan keterlibatan anggota. Partisipasi anggota dalam demokrasi koperasi pondok pesantren merupakan aspek dasar yang mencerminkan anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.

Pemilihan pengurus dalam koperasi pondok pesantren merupakan salah satu aspek kunci dalam menerapkan prinsip demokrasi. Proses ini melibatkan seluruh anggota koperasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mewakili suara dan kepentingan kolektif dari anggota. Pemilihan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara yang melibatkan semua anggota koperasi, dengan hak suara yang sama. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pengajuan calon pengurus, penyampaian visi dan misi oleh calon, hingga pelaksanaan pemilihan dan pengumuman hasilnya.

Pengurus dan pengawas serba usaha koperasi pondok pesantren mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas terhadap kelancaran kegiatan koperasi. Dengan menjalani tugas dalam pengawasan dan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanahnya mengawasi pengelolaan perkoperasian demi adanya transparansi, ketertiban organisasi serta administrasi sehingga apabila terdapat hal yang menyimpang segera dapat di ketahui dan di perbaiki. (Fahmi Habibi Musthofa, 2023) Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan pengurus demokrasi dalam

koperasi pondok pesantren: 1. Kepesertaan Anggota, 2. Transparansi Proses, 3. Kriteria Calon Pengurus. 4. Proses Pemilihan, 5. Penegakan Akuntabilitas 6. Evaluasi dan Pengembangan, 7. Pendidikan dan Pelatihan.

Kebijakan dan regulasi koperasi adalah bagian penting dalam pengelolaan koperasi, termasuk koperasi yang ada di pondok pesantren. Koperasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi dikelola dengan cara yang transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya evaluasi kinerja koperasi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas operasional, memenuhi kebutuhan anggota, dan mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih baik.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur pada jurnal ekonomi syariah yang berjudul “ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab, Kab. Jayapura. Papua” mengemukakan bahwa pemilihan pengurus Kopontren dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, pemilihan pengurus diatur secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali. Hal ini selaras dengan demokrasi koperasi pondok pesantren yang merupakan langkah strategis untuk menciptakan koperasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pemilihan pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan dan keterlibatan anggota. Partisipasi anggota dalam demokrasi koperasi pondok pesantren merupakan aspek dasar yang mencerminkan anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.

Berbagai tugas, wewenang, fungsi dan peran pengurus tersebut, menunjukkan bahwa pengurus merupakan motor penggerak organisasi dan usaha koperasi. Jalannya roda kegiatan koperasi benar-benar berada ditangan pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengurus memegang kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Dengan adanya pemilihan secara demokratis, maka setiap anggota bisa mempertanggungjawabkan dan menyesuaikan pilihannya sesuai dengan sumber daya pengurus yang dibutuhkan baik dalam keterampilan maupun pengetahuannya.

Kopontren Ulil Albab menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan strukturisasi terkait pemilihan pengurusnya dalam wadah organisasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dimana setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya. Oleh karena itu, srtuktur organisasi sangat di perlukan dalam organisasi yang baru di bentuk, dalam keadaan berkembang maupun sudah mapan. Pengelolaan koperasi sebagai

pertimbangan bagi pengurus untuk mengetahui sejauh mana adanya keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban para anggota didalam memelihara dan mengembangkan koperasi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kopontren Ulil Albab, Tugas dan kewajiban pengurus Kopontren, sebagai berikut : 1) Memimpin Organisasi dan usaha koperasi. 2) Menyelenggarakan rapat anggota, rapat pengurus serta mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya. 3) Menyelenggarakan administrasi organisasi seperti: Melakukan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan. 4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. 5) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan danbelanja koperasi.6) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. 7) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. 8) Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagaimana akibat karena kelalaiannya.

Tantangan dan Hambatan

Faktor yang menjadi tantangan dan menghambat keberhasilan yang dapat mempengaruhi manajemen koperasi pondok pesantren Ulil Albab : 1. Kepemimpinan yang kurang efektif : keberadaan pemimpin yang efektif di kopontren Ulil Albab menjadikan faktor penting yang dapat membantu dan mengembangkan juga mengelola koperasi dengan baik. Sedangkan kepemimpinan yang tidak efektif dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan koperasi. 2. Kurangnya Motivasi : motivasi yang tinggi yang di berikan oleh pimpinan dengan teladan yang baik dapat membantu anggota koperasi untuk bekerja dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan koperasi. Sedangkan motivasi yang rendah dan teladan yang kurang baik menjadikan penghambat bagi keberhasilan koperasi. 3. Sumber daya manusia : keterampilan dan pengetahuan anggota koperasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan koperasi. Salah satu penghambat di kopontren ulil albab adalah sulitnya mencari sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi sehingga dengan begitu membutuhkan proses untuk bisa mengembangkan kopontren Ulil Albab. 4. Lingkungan Eksternal : lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial, dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi. Lingkungan yang kondusif juga terdapat di sekitar daerah kopontren ulil albab hanya kemungkinan kecil terjadi di masyarakat umum yang memiliki potensi untuk menjadikan lingkungan kurang kondusif. 5. Sistem manajemen: kopontren ulil albab sistem manajemen yang sudah ada sudah berfungsi dengan baik dan mungkin perlu banyak yang di tingkatkan sehingga bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur bahwa demokrasi dalam koperasi merupakan hal fundamental yang merujuk pada penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Hal ini menekankan partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam proses pembuatan keputusan, yang dilakukan secara kolektif dan transparan.

Dengan pemilihan pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota menciptakan lingkungan yang adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan dan keterlibatan anggota. Partisipasi anggota dalam demokrasi koperasi pondok pesantren merupakan aspek dasar yang mencerminkan anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.

Berbagai tugas, wewenang, fungsi dan peran pengurus tersebut, menunjukkan bahwa pengurus merupakan motor penggerak organisasi dan usaha koperasi. Jalannya roda kegiatan koperasi benar-benar berada ditangan pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengurus memegang kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi.

Adapun tantangan dan hambatan demokrasi manajemen koperasi pondok pesantren Ulil Albab : 1. Kepemimpinan yang kurang efektif, 2. Kurangnya Motivasi, 3. Sumber daya manusia, 4. Lingkungan eksternal, dan 5. Sistem manajemen.

G. SARAN

Koperasi pondok pesantren sudah menjadi keharusan menerapkan demokratis dalam pelaksanaan pemilihan pengurus demi kesejahteraan pesantren dan tercapainya tujuan dari koperasi tersebut. Sehingga segala bentuk dan tanggung jawab dari setiap pengurus dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan strukturisasi yang jelas. Maka dari itu, koperasi pondok pesantren perlu didukung oleh berbagai sumber daya manusia salah satunya pimpinan pondok, para anggota koperasi dan juga para santri yang ada disana.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. Aep Tata Suryana, S. M. (2023). *Manajemen Koperasi Pondok Pesantren*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Fahmi Habibi Musthofa, d. (2023). ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab, Kab. Jayapura. Papua). *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 34.
- Maulana, A. S., & MM, S. R. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Retnowati, D. (2015). Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi di Indonesia. *In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, (Vol. 1, No. 6).
- Sitio, A. (2001). *koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga.